

ABSTRAK

Generasi Z mendominasi populasi penduduk Indonesia hingga 27,94% dengan jumlah sekitar 74,93 juta jiwa. Survei Angkatan Kerja Nasional oleh Badan Pusat Statistik memaparkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 9,8 juta penduduk usia muda yang menghadapi fenomena *Not in Employment, Education and Training* (NEET) alias sedang menganggur. Tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan generasi Z dapat menghambat peluang terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang mana juga dibarengi dengan fenomena bonus demografi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat ketentuan mengenai penyelesaian masalah pengangguran di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Dinas Tenaga Kerja sebagai pelaksana tugas teknis dan otonomi di bidang ketenagakerjaan bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dalam urusan menanggulangi masalah pengangguran di tingkat daerah. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi mengelai penyelesaian masalah pengangguran di Indonesia dan Kota Semarang serta mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam mengurangi pengangguran bagi kalangan Generasi Z di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menerapkan pendekatan *deskriptif analitis* yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja dalam menyediakan pelatihan dan layanan penempatan tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan Generasi Z di Kota Semarang. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif, dengan penyajian data melalui kombinasi antara studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai upaya mengatasi pengangguran di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden No. 113 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Sedangkan regulasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu. Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam mengatasi Pengangguran Generasi Z dilakukan melalui berbagai program, diantaranya adalah program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja. Pelayanan Penempatan Kerja yang diberikan meliputi penyediaan fasilitas rekrutmen untuk perusahaan, layanan konsultasi & rekomendasi paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, dan penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja atau *Job Fair* sebagai ajang untuk menyerap tenaga kerja melalui rekrutmen dan penempatan.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Generasi Z, Pengangguran.

ABSTRACT

Generation Z dominates the Indonesian population by 27.94% with a total of around 74.93 million people. The National Labor Force Survey by the Central Bureau of Statistics explained that in 2021 there were around 9.8 million young people who faced the Not in Employment, Education and Training (NEET) phenomenon, aka being unemployed. The high unemployment rate among Generation Z can hamper the chances of realizing the Golden Indonesia 2045, which is also accompanied by the demographic bonus phenomenon. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower contains provisions regarding the resolution of unemployment problems in Indonesia which must be implemented by the government. The Manpower Departement as the executor of technical tasks and autonomy in the field of manpower is tasked with assisting the Central Government in matters of tackling unemployment problems at the regional level. The purpose of this legal writing is to find out how the regulations regarding the settlement of unemployment problems in Indonesia and Semarang City and to find out how the role of the Manpower Departement (Disnaker) in reducing unemployment for Generation Z in Semarang City.

The approach method used in this research is an empirical juridical approach. Data is collected from two main sources, namely primary data and secondary data. This research applies a descriptive analytical approach that aims to provide a comprehensive picture of the implementation of the Manpower Departement's role in providing training and labour placement services to address the problem of unemployment among Generation Z in Semarang City. The data analysis method applied is qualitative analysis, with data presentation through a combination of field studies and literature studies.

The results of this legal writing can be concluded that the regulations regarding efforts to overcome unemployment in Indonesia in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Presidential Regulation No. 113 of 2022 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 36 of 2020 concerning Work Competency Development through the Pre-Employment Card Program. Meanwhile, the regulation to address unemployment in Semarang City is regulated in Semarang Mayor Regulation No. 20 of 2021 on the Application of Open and Integrated Labor Market Information System. The role of Semarang City Manpower Departement in overcoming Generation Z Unemployment is carried out through various programs, including job training programs implemented by the Technical Implementation Unit of the Job Training Center Office. Job Placement Services provided include the provision of recruitment facilities for companies, consultation services & passport recommendations for prospective Indonesian Migrant Workers, and the organization of a Labor Exchange or Job Fair as a place to absorb labor through recruitment and placement.

Keywords: *Manpower Departement, Job Training, Labour Placement, Generation Z, Unemployment.*